



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PURNAMA BUDI SANTOSA
2. Jabatan : SEKRETARIS DEPARTEMEN TEKNIK GEODESI
3. NHK : 813072

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.847.600.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 398 m2/375 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.870.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m2/80 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 535.000.000
3. Tanah Seluas 418 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.337.600.000
4. Tanah Seluas 221 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.105.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **367.500.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 158.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO BEBEK Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA FIT BEBEK Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
5. MOTOR, YAMAHA FAZIO BEBEK Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **26.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.716.745.900
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	8.958.345.900
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.958.345.900

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.